

Respon Amerika Serikat dalam Menyeimbangkan Kekuatan Cina Melalui AUKUS dalam Klaim Kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan

Dimas Idham Santoso¹, Ahmad Mubarak Munir², Pamungkas Ayudhaning Dewanto³,
Khairur Rizki⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB,
Indonesia, 83155

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB,
Indonesia, 83155

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB,
Indonesia, 83155

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB,
Indonesia, 83155

santosodimas10@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the formation of AUKUS as a new defense pact as the United States' response to China's unilateral claim of sovereignty in the South China Sea. The lack of presence of the United States, which for the last few decades has been too busy with its military operations in the Middle East region, has given China more freedom to carry out aggressive maneuvers in the Asia Pacific region which has then created an imbalance of power due to China's military strength being far superior to that of the alliance countries. United States in Asia such as the Philippines and Australia. In this research, a qualitative approach was used which aims to understand the phenomenon of events experienced by the subject through descriptions. Furthermore, this research uses the balance of power theory and the concept of deterrence as analytical tools to understand the material raised in this research. The results of this research show that AUKUS was formed due to the decline of the United States in various sectors which coincided with the rise of China as a new superpower. It is hoped that the selection of Australia and the UK in this collaboration will provide additional support to pressure China in the South China Sea through short-term and long-term programs.

Keywords: AUKUS, United States, Australia, United Kingdom.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan AUKUS sebagai pakta pertahanan baru sebagai respon Amerika Serikat atas aksi klaim kedaulatan sepihak yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Kurangnya kehadiran Amerika Serikat yang selama beberapa dekade terakhir terlalu sibuk dengan operasi militernya di kawasan timur tengah membuat Cina lebih leluasa melakukan manuver-manuver agresif di kawasan asia pasifik yang kemudian menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan akibat kekuatan militer Cina yang jauh lebih unggul di atas negara-negara aliansi Amerika Serikat di Asia seperti Filipina dan Australia. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena peristiwa yang dialami subjek melalui uraian. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan teori *balance of power* dan konsep *deterrence* sebagai alat analisis untuk memahami materi yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan AUKUS dibentuk akibat kemunduran Amerika Serikat dalam berbagai sektor yang bersamaan dengan bangkitnya Cina sebagai salah satu negara adidaya baru. Dipilihnya Australia dan Inggris dalam kerjasama ini diharapkan dapat menjadi dukungan tambahan untuk menekan Cina di Laut Cina Selatan melalui program jangka pendek dan jangka Panjang.

Kata Kunci: AUKUS, Amerika Serikat, Australia, Inggris.

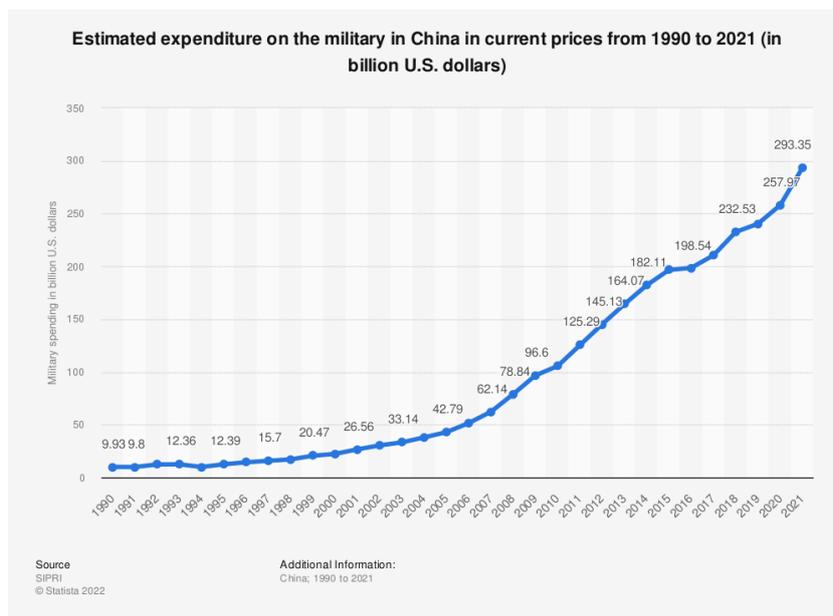
PENDAHULUAN

Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (Cina) telah diselubungi kompetisi selama beberapa tahun terakhir. Terdapatnya perbedaan ideologi antar kedua negara kerap menimbulkan perbedaan cara pandang dalam pengambilan kebijakan luar negeri serta upaya hegemoni terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam hal teknologi, AS dan Cina telah terlibat dalam persaingan yang semakin memanas dari tahun ke tahun khususnya pada masalah terkait sistem informasi teknologi. Baru-baru ini tepatnya pada tahun 2019 AS mengambil langkah berani dengan memblokir Huawei karena produknya dituduh dapat melakukan mata-mata terhadap informasi penting yang disebarkan melalui platform-nya. Tuduhan tersebut juga diperkuat oleh bagaimana undang-undang di Cina tidak memungkinkan suatu perusahaan untuk menolak permintaan pemerintah Cina untuk mendapatkan informasi intelijen jika sewaktu-waktu diminta (BBC Indonesia, 2019).

Persaingan AS dan Cina juga sangat terasa pada sektor ekonomi dimana AS merasa terancam dominasinya akibat Cina yang mulai menguasai pasar dunia. Hal tersebut terlihat dari defisit perdagangan AS dengan Cina yang mencapai 419,5 miliar USD yang kemudian menyebabkan AS memulai perang dagang dengan Cina melalui pemberlakuan tarif impor pada produk-produk Cina. Pemberlakuan tarif tersebut disahkan pada masa pemerintahan Trump di bawah *section 301 of the Trade Act of 1974* yang memungkinkan presiden untuk memberlakukan tarif terhadap barang impor dari negara lain yang terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil dimana perwakilan dagang AS secara spesifik menemukan transfer teknologi dan peraturan kekayaan intelektual Cina merupakan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan AS (Lee, 2023).

Keberanian Cina atas pengklaiman sepihak LCS tidak lepas dari kemajuan militernya yang sangat pesat dalam beberapa dekade belakangan ini. Kemajuan militer Cina sangat erat kaitannya dengan GDP Cina yang meningkat tajam sehingga membuat Cina memiliki kapabilitas untuk berinvestasi lebih jauh kedalam bidangnya (He et al., 2023). Tercatat sejak tahun 1990 Cina mengeluarkan jumlah uang yang melonjak setiap tahunnya untuk kepentingan militernya yang dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Gambar 1.1. Pengeluaran Militer Cina dari 1990 sampai 2021



Sumber: (Textor, 2023)

Pengeluaran biaya ini membuat Cina dapat melakukan *Revolutions in Military Affairs* (RMA) yang dimana tidak hanya berfokus pada meningkatkan kualitas dan kuantitas namun juga mengubah pola atau strategi dalam mengembangkan militernya (Danesworo & Munabari, 2018). RMA sendiri menurut *Defence White Paper* Cina 2015 adalah membangun militer yang terinformasi untuk memenangkan perang lokal yang terinformasi (Liao, 2020). Hal yang sebaliknya tampak pada kekuatan AS, dimana mereka menunda beberapa program modernisasi militer mereka dan mengalami penurunan kesiapan dalam berbagai area sejak 2001 yang utamanya disebabkan karena terlalu berfokus pada operasi kontra terorisme dan kontra pemberontakan (Bateman, 2022).

Untuk mempertahankan stabilitas di kawasan LCS, Amerika Serikat bahkan mengoperasikan kembali pangkalan militer AS di Darwin, Australia dengan alasan bahwa AS merasa terancam oleh kekuatan Cina yang terus tumbuh di Asia Pasifik sejak satu dekade terakhir sehingga memaksa AS harus kembali mengambil langkah strategis dengan melakukan kerjasama antara Angkatan Udara AS dengan Angkatan Udara Australia serta membuka akses bebas bagi kapal laut AS ke pangkalan laut Australia HMAS Stirling yang terletak di pesisir barat Australia (Waluyo & Lestari, 2015). Pengoperasian kembali pangkalan tersebut merupakan tambahan kekuatan AS dari pangkalan militer yang telah ada sebelumnya untuk menguatkan posisinya di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi perkembangan militer Cina yang semakin pesat pada beberapa dekade belakangan.

Mulai tahun 2021 AS beserta sekutunya Inggris dan Australia mulai mengoperasikan strategi baru guna menjadi penyeimbang kekuatan Cina di LCS dengan meresmikan pakta trilateral AUKUS. AUKUS merupakan pakta pertahanan yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, kemandirian dan teknologi. Salah satu fokus perjanjian yang paling menyita perhatian adalah program pengadaan kapal selam bertenaga nuklir SSN-AUKUS yang akan diberikan kepada Australia pada awal tahun 2040 mendatang (Anadolu, 2023). Meskipun aktifitas diplomasi AS di Asia Pasifik telah banyak di bahas, kajian hubungan internasional (HI) masih belum banyak membahas mengenai peran AS dalam menyeimbangkan kekuatan Cina di LCS melalui AUKUS. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana aliansi trilateral AUKUS ini dapat menjadi alat dan strategi bagi upaya Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kekuatan Cina di kawasan LCS guna melindungi kepentingan AS dan negara-negara aliansinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Amerika Serikat menyeimbangkan kekuatan Cina di Laut Cina Selatan melalui AUKUS?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama ditulis oleh Adrianus Lengu Wene dalam sebuah artikel berjudul "Determinasi Pakta AUKUS Terhadap Keamanan Kawasan Asia Tenggara" (Wene, 2021). Artikel tersebut membahas kemunculan pakta AUKUS adalah sebagai akibat dari gencarnya agresifitas Cina di LCS terhadap negara-negara di sekitarnya dan juga bagaimana Cina menguasai perdagangan dunia melalui program *Belt and Road Initiative* turut membuat negara-negara di dunia yang bergantung kepada Cina tidak

mampu menghalau arogansi yang terbentuk dari kekuatan Cina. Penelitian yang ditulis Adrianus kemudian melihat bagaimana negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN belum mampu memberikan satu suara yang sama terhadap sikapnya terhadap AUKUS. Perbedaan-perbedaan opini antar negara ASEAN terhadap pakta AUKUS kental akan faktor historis dan ketergantungan terhadap salah satu negara, misal ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap Cina dan satu sisi ketergantungan keamanan negara-negara ASEAN terhadap Amerika Serikat.

Hasil penelitian yang ditulis Adrianus menunjukkan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional masih lemah dalam menyikapi isu-isu terkait konflik di seputaran kawasannya, terlebih lagi konflik ini melibatkan dua negara *superpower* dunia, namun ada beberapa opsi rasional yang dapat dilakukan ASEAN guna menyikapi persaingan antara dua kekuatan besar dunia ini, dimana bisa saja ASEAN berpihak kepada salah satu negara yang lebih kuat (*bandwagoning*) atau membuat kerjasama tandingan antar negara anggota ASEAN (*balancing*) atau menjaga keseimbangan dalam derajat yang berbeda. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Adrianus Lengu Wene dengan penelitian yang penulis angkat. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Adrianus berfokus pada sikap atau kebijakan luar negeri negara-negara anggota ASEAN yang berbeda atas determinasi yang ditimbulkan AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara, sementara penulis berfokus pada sikap AS dan sekutu melalui AUKUS untuk menyeimbangkan kekuatan Cina di Laut Cina Selatan.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Audry Anjani Danindra Novita dalam sebuah artikel yang berjudul "AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific" (Novita, 2022). Penelitian ini berfokus kepada menganalisa strategi dan kepentingan nasional AS di Asia Pasifik, lebih lanjut dalam tulisannya dijelaskan bahwa Presiden Biden menggunakan pendekatan yang berbeda pada kebijakan luar negerinya, ia lebih berfokus kepada prioritas keamanan nasional, yakni mengamankan hegemoni AS, mencegah serangan langsung ke AS dan sekutunya serta menjaga dominasi AS di wilayah kritis dengan cara menjadi pemimpin dalam sistem internasional yang terbuka dan stabil melalui aturan, aliansi demokratik dan institusi trilateral. AS dalam kepemimpinan Joe Biden beranggapan bahwa kawasan Indo-Pasifik saat ini jauh lebih penting dibanding Afghanistan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian teknologi kapal selam berbahan nuklir oleh AS kepada Australia adalah demi mendapatkan kembali kekuatan di Indo-Pasifik yang telah lama dipegang oleh Cina. Inggris dan Australia tergabung dalam aliansi ini dikarenakan telah memiliki hubungan yang baik dengan AS sejak lama serta kesamaan minat, niat, dan nilai dari keamanan telah berujung kepada dibentuknya AUKUS. Terdapat persamaan dan perbedaan antara artikel yang ditulis Audry dengan artikel yang penulis angkat, dimana persamaannya adalah membahas tentang strategi dan kepentingan AS melalui AUKUS, sedangkan perbedaannya adalah artikel yang penulis angkat akan menjelaskan lebih dalam faktor-faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya respon AS melalui AUKUS.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Jamal Din Aulia dan Ahmad Sahide dalam sebuah artikel yang berjudul "*Regional Stability Rivalry in the Indo Pacific Region: Cina's Interest in Responding the AUKUS Trilateral Pact*" (Aulia & Sahide, 2022). Penelitian ini berfokus pada respon Cina terhadap pembentukan AUKUS yang menganggap AUKUS

dapat mengganggu kestabilan regional dan kedamaian yang telah berlangsung sehingga dapat berujung kepada perlombaan persenjataan di kawasan seperti era Perang Dingin. Pernyataan yang berbeda dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Australia yang menyebut argumen yang dilontarkan Cina, seperti kekhawatiran akan perlombaan persenjataan tidak masuk akal dimana Cina sendiri sudah mempunyai hampir 400 kapal di kawasan. Lebih lanjut lagi Cina melalui Duta Besarnya membalas dengan menyatakan seharusnya pejabat pemerintahan Australia tidak perlu mengeluarkan pendapat yang dapat menyebabkan konfrontasi dengan Cina hanya karena demi mencari keuntungan politik semata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon Cina dalam menanggapi AUKUS adalah melalui *speech acts* Anti AUKUS dan terus mengkritik pakta AUKUS dalam berbagai agenda internasional, lebih jauh lagi Cina juga terus melakukan modernisasi sistem militernya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi AUKUS. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Jamal dan Ahmad dengan penelitian yang penulis angkat, persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas tentang AUKUS, namun perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah penulis berfokus kepada respon Amerika Serikat melalui AUKUS dalam melihat modernisasi militer Cina dimana penelitian ini melakukan hal yang sebaliknya.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Eryn Sobarini, Deni Dadang Ahmad Rajab dan Surryanto Djoko Waluyo dalam sebuah artikel berjudul "AUKUS Pact in the Perspective of Security Dilemma" (Sobarini et al., 2021). Penelitian tersebut berfokus pada menggunakan Security Dilemma sebagai unit analisa dalam melihat perkembangan hubungan internasional yang terjadi di kawasan. AUKUS dikhawatirkan dapat menjadi pemicu dari adanya perlombaan senjata karena melibatkan banyak negara dengan tujuan yang berbeda-beda. Walaupun AUKUS bukan hanya sebuah kerjasama kapal selam, tetapi juga terkait dengan pertukaran informasi dan teknologi di bidang kecerdasan buatan dan teknologi kuantum, namun Cina melihat pakta tersebut sebagai sebuah tindakan agresif yang dapat mengganggu kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun AUKUS bukan merupakan bentuk dari perlombaan persenjataan, namun jelas terlihat bahwa AUKUS merupakan bentuk dari *security dilemma* dari negara-negara penyokongnya. ASEAN sebagai lembaga sentral di antara tensi yang meninggi antar dua kekuatan besar ini harus tetap menjaga kenetralannya dan menunjukkan perilaku kolektif guna menurunkan tensi politik yang ada. Perbedaan penelitian yang ditulis Eryn, dkk dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan *security dilemma* sebagai teori konsep, sedangkan penelitian yang penulis angkat menggunakan teori *balance of power* dan *deterrence* sebagai konsep.

Penelitian Selanjutnya ditulis oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy dalam sebuah artikel berjudul "Analysis of the Indo-Pacific Outlook and Impact of the AUKUS Tripartite Pact" (Kennedy, 2022). Penelitian ini berfokus pada kekuatan ekonomi Cina yang menghimpit negara-negara di Asia melalui kebijakan luar negerinya membuat Amerika Serikat selaku salah negara hegemon yang juga memiliki kepentingan ekonomi besar di Indo-Pasifik harus mengalihkan fokusnya ke kawasan ini demi memastikan keberlangsungan nilai-nilai kebebasan dan keadilan. Negara-negara di Indo-Pasifik sadar akan kerugian ekonomi jika berani melawan pengaruh Cina sehingga AUKUS

diperlukan sebagai alat distribusi kekuasaan untuk mengembalikan kestabilan di kawasan.

Hasil kesimpulan penelitian ini menyebutkan persaingan hegemoni antara Cina dan Amerika Serikat tak lepas dari upaya penguasaan pasar dan suplai energi alam yang melimpah di Laut Cina Selatan dan AUKUS merupakan keberlanjutan dari strategi Amerika Serikat untuk melawan pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik. Banyak negara-negara di kawasan ini juga mengharapkan peran yang lebih besar dari Amerika Serikat yang mempunyai kapabilitas untuk menghadapi Cina demi menjaga keamanan kawasan. Perbedaan penelitian yang ditulis Poshma Sariguna dengan penelitian yang penulis angkat adalah penelitian ini lebih berfokus kepada alasan ekonomi yang membuat negara-negara di Asia-Pasifik tunduk dengan Cina akibat kurangnya kapabilitas mereka, sedangkan penelitian ini lebih kepada alasan militer yang membuat Amerika Serikat membentuk AUKUS untuk menjadi *counter* dari penguatan militer Cina di LCS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan guna mengetahui variabel mandiri tanpa membuat suatu perbandingan dengan variabel lain, sedangkan metode kualitatif merupakan cara penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang natural dan peneliti dalam hal ini merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Oleh karena itu, peneliti haruslah memiliki pemahaman yang baik terhadap metode dan teori atau konsep yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman, dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai selesai, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B. & Huberman, 1992).

KERANGKA PEMIKIRAN

BALANCE OF POWER

Kenneth N. Waltz, dalam karyanya yang berjudul *Theory of International Politics*, berpendapat bahwa keseimbangan kekuasaan adalah suatu kondisi yang diperlukan untuk stabilitas di dalam sistem internasional. Waltz "keseimbangan kekuasaan adalah dasar tradisional dan fundamental untuk ketertiban dalam hubungan internasional" (Frankel & Waltz, 1980). Menurut Waltz, sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas sentral yang dapat menegakkan aturan dan mencegah konflik antara negara-negara. Di dalam lingkungan ini, negara-negara harus mengandalkan kekuasaan mereka sendiri untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan mereka.

Namun, ketika negara-negara semakin kuat, mereka mungkin tergoda untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk mendominasi negara-negara lain, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik. Untuk mencegah hasil yang buruk ini, keseimbangan kekuasaan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang menjadi terlalu kuat. Hal ini terjadi karena ketika satu negara menjadi terlalu kuat, negara-negara lain akan secara alami membentuk aliansi atau mengambil langkah lain untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut, menciptakan keseimbangan kasar di mana tidak ada satu negara pun yang dapat mendominasi sistem.

Selebihnya, Waltz mengatakan bahwa keseimbangan kekuasaan adalah mekanisme yang mempunyai regulasi diri dan beroperasi secara independen terhadap niat atau kepribadian pemimpin atau negara-negara individual. Ini berarti bahwa bahkan jika satu negara berusaha mendominasi sistem, keseimbangan kekuasaan secara alami akan bekerja untuk menyeimbangkan kekuatan negara tersebut, dan mencegahnya mencapai tujuannya.

Waltz berpendapat bahwa keseimbangan kekuasaan bukanlah konsep statis, melainkan proses dinamis yang terus bergeser sebagai respons terhadap perubahan dalam distribusi kekuasaan. Meskipun teori Waltz telah mengalami kritik dan perdebatan, ia tetap menjadi konsep yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Keterkaitan antara *balance of power* dengan penelitian ini dapat dilihat dari kebangkitan Cina dalam segi ekonomi telah membuatnya mampu membangun dan berinvestasi lebih jauh ke dalam sektor teknologi dan pertahanan sehingga menjadi negara yang sangat mendominasi di kawasan Asia. Kekuatan Cina pada masa kini tidak hanya kerap mengancam negara-negara di sekitarnya namun juga telah menimbulkan kekhawatiran dari negara adidaya Amerika Serikat karena dinilai dapat menjadi ancaman terhadap hegemoni maupun dominasi yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat. Perjanjian AUKUS yang dijadikan sebagai respon negara anggotanya untuk ikut lebih jauh mengembangkan teknologi mereka demi mengejar ketertinggalan dari Cina guna menghadapi potensi ancaman yang akan muncul di masa mendatang.

Lebih jauh Amerika Serikat menilai kawasan Asia merupakan kawasan yang amat penting karena terdapat partner dan aliansi yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri Amerika Serikat jika sewaktu-waktu terjadi gesekan antar negara di wilayah Asia. Fokus Amerika Serikat yang berangsur-angsur beralih dari kawasan Timur Tengah ke Asia dalam beberapa tahun terakhir juga merupakan salah satu bentuk nyata adanya ancaman baru yang memerlukan pendekatan lebih mendalam bagi Amerika Serikat guna memastikan kestabilan dan penyebaran kekuasaan di Asia tidak hanya dipegang oleh satu negara saja. Oleh sebab itu AUKUS lahir sebagai salah satu jawaban atas ancaman-ancaman tersebut. Meskipun perjanjian tersebut juga mencakup kerjasama dalam kecerdasan buatan dan perang siber, namun tujuan terbesarnya adalah pembuatan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia yang dilengkapi oleh teknologi terbaru guna melawan kekuatan Cina di masa yang akan datang.

DETTERENCE

Konsep *Deterrence* dapat diartikan sebagai penggunaan ancaman oleh satu pihak untuk meyakinkan pihak lainnya untuk menahan diri dari mengambil langkah aksi

yang sama. Konsep ini lebih berfokus kepada kapabilitas militer bersifat defensif yang ditujukan untuk tercapainya stabilitas dunia tanpa terjadinya aksi militer atau peperangan (Huth, 1999). Konsep *Deterrence* banyak digunakan pada masa Perang Dingin dimana saat itu cara tersebut berusaha dijadikan jalan dalam upaya menghindari konfrontasi dan alat pertahanan terhadap pihak musuh. *Deterrence* sebagai konsep erat pula hubungannya dengan kemunculan pola bipolar dalam sistem internasional. Adapun konsep ini terbagi menjadi dua jenis yaitu: *primary deterrence*, yang artinya mencegah supaya potensial aggressor tidak menyerang negara deterrer dan *extended deterrence*, yang artinya mencegah agresor untuk menyerang negara sekutu atau anggota aliansi deterrer (Meilianawati, 2017).

Primary deterrence bersifat kedalam dan dilakukan dengan cara menambah kekuatan alutista negara deterrer dengan teknologi terbaru, contohnya adalah seperti pembelian kurang lebih 58 unit pesawat F-35 oleh Australia dari perusahaan asal AS Lockheed Martin untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya seiring dengan perkembangan geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Pasifik.

Extended deterrence sendiri lebih bersifat keluar karena bertujuan untuk mengamankan negara sekutu dari potensi serangan negara aggressor. Salah satu contoh *extended deterrence* adalah didirikannya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai aliansi pertahanan AS di wilayah Eropa guna menghambat perkembangan dan penyebaran ideologi komunis yang dilakukan Uni Soviet kala itu. Aliansi NATO memiliki prinsip bahwa serangan yang dilakukan terhadap salah satu anggotanya dapat diartikan sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO yang memaksa negara potensial aggressor akan berfikir dua kali untuk melakukan serangan karena akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan.

Keterkaitan antara *deterrence* dengan penelitian ini terletak pada konsep *extended deterrence* dimana Amerika Serikat dalam hal ini berusaha menjaga negara aliansinya khususnya Australia dalam hal ini dari ancaman Cina yang bertindak sebagai negara *potential* aggressor. Pembentukan AUKUS dapat dijadikan jalan untuk menimbulkan rasa takut kepada Cina agar mengurangi tindakan-tindakan agresif yang kerap dilakukan selama ini.

Asal muasal penggunaan *extended deterrence* sendiri dalam hal ini diawali dengan *strategic rebalancing* melalui *Pivot to Asia* yang dilakukan AS dalam pendekatan kebijakan luar negerinya untuk menyesuaikan dengan dinamika global yang ada. Seiring dengan kompleksitas tantangan di kawasan Asia Pasifik, AS merasa perlu meningkatkan kapabilitas dan juga jaminan terhadap sekutunya (Australia) dalam menghadapi tantangan dan peluang baru dalam jangka beberapa tahun kedepan. Beberapa implikasi yang diharapkan dari *extended deterrence* dalam hal tersebut antara lain adalah meningkatnya kehadiran dan koordinasi dengan sekutu, memperkuat hubungan ekonomi, serta meningkatkan partisipasi dalam organisasi regional dalam menangani isu-isu keamanan dan politik di kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Australia, The United Kingdom and The United States (AUKUS) merupakan pakta pertahanan dan kerjasama keamanan yang dibentuk oleh tiga negara dengan kekuatan yang besar, Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing kepala negara yaitu, Scott Morrison (Perdana

Menteri Australia), Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris), dan Joseph Biden (Presiden Amerika Serikat) pada 15 September 2021. Pakta tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kolaboratif dalam pengembangan kapal selam bertenaga nuklir; kolaborasi ini menggunakan teknologi mutakhir dalam bidang keamanan dan pertahanan, khususnya dalam pengembangan teknologi kuantum. Tujuan lainnya meliputi pertukaran informasi, pengembangan teknologi bawah air, serta mendukung dan menguntungkan industri keamanan ketiga negara tersebut. Pakta ini, secara eksplisit, juga mengumumkan bahwa kerjasama yang sedang dilakukan adalah untuk melambatkan (atau bahkan menghentikan) pengaruh China yang semakin tersebar di kawasan Indo-China (Aulia & Sahide, 2022).

KEBANGKITAN CINA SEBAGAI KEKUATAN BARU

Sepanjang sejarahnya, AS kerap mengalami kenaikan serta penurunan dalam hal kekuasaan dan pengaruhnya terhadap negara-negara lain di dunia. Contohnya secara singkat saat berakhirnya Perang Dunia II peran AS sangat dominan pada sektor ekonomi, politik dan militer global yang salah satunya didukung akibat adanya program *Marshall Plan*. Namun setelahnya, AS dihadapkan dengan isu-isu yang cukup berat seperti Perang Dingin, Perang Vietnam, Perang Teluk dan perang melawan terorisme di Timur Tengah dimana dalam beberapa perang tersebut AS mampu meraih kemenangan, namun selebihnya AS harus dipaksa mengalah oleh realita di lapangan. Belum lagi sektor ekonomi AS juga beberapa kali sempat dilanda krisis yang berakibat pada kondisi ekonomi jangka Panjang. Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, AS memutuskan untuk mengenakan tarif impor bagi barang-barang dari Cina yang dianggap sebagai sumber masalah tingginya defisit perdagangan antara AS dan Cina.

Hal tersebut kemudian mendorong Cina melakukan hal yang sama terhadap produk-produk impor dari AS sehingga menciptakan perang dagang yang tidak membuahkan keuntungan signifikan bagi perusahaan dan pekerja di AS. Pemberlakuan tarif yang dilakukan AS untuk melindungi industri dalam negerinya justru merugikan AS karena aksinya tersebut turut dibalas oleh Cina dengan melakukan hal serupa (Durante, 2022). Namun alasan Trump sendiri bersikeras untuk mengenakan *tariff* pada barang asal Cina salah satunya dikarenakan nilai ekspor Cina telah menyentuh angka 236 Triliun Dollar dan cukup jauh berada di atas nilai ekspor AS yang berada di angka 155 Triliun Dollar di tahun 2017 (Nurmamurti et al., 2022).

Setelahnya memasuki masa pemerintahan Joe Biden pada 2021, AS mengambil kebijakan yang mengejutkan banyak pihak dalam bidang militernya dengan menarik penuh pasukannya dari Afghanistan. Kekuatan militer AS yang seharusnya dengan mudah dapat mengalahkan Taliban dengan segala alutista canggih yang dimiliki nyatanya harus dipaksa mundur oleh situasi di lapangan, karena faktanya selama lebih dari 20 tahun operasi militer yang dilakukan AS di Afghanistan tidak membuahkan hasil signifikan dalam menumpas Taliban, dan upaya pembangunan pemerintah pusat Afghanistan yang disokong oleh AS tidak kunjung menunjukkan hasil yang diharapkan. Selain itu AS menanggung beban kerugian materil dan personil yang sangat luar biasa selama operasinya dimana 2500 prajurit AS gugur, 20.000 luka-luka dan triliunan dollar dihabiskan untuk membiayai operasi militernya. Jenderal Mark Milley selaku Ketua

Kepala Staff Gabungan AS menyebut mundurnya AS dari Afghanistan sebagai salah satu kegagalan strategis yang tidak sesuai dengan harapan (Puspaningrum, 2021).

Hal yang sebaliknya nampak berbeda muncul pada Cina sebagai sebuah negara yang perlahan muncul sebagai pesaing baru bagi dominasi AS dalam kancah sistem dan pengaruh dunia internasional. Kemunduran AS dalam berbagai sektor dalam dan luar negeri menjadi keuntungan sendiri bagi Cina yang lebih mudah melakukan pergerakan-pergerakan dalam upayanya mendominasi kawasan Asia Pasifik. Maka dari itu di sub bab selanjutnya penulis akan mencoba sedikit kembali ke belakang untuk memberikan pemahaman singkat bagaimana bangkitnya Cina sebagai *the new superpower*.

Setelah sukses dengan industrialisasi, Cina di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping kemudian meluncurkan sebuah program baru yang dikenal sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan melakukan pembangunan dan investasi pada negara-negara di dunia untuk memperkuat konektivitas Asia dengan Eropa. BRI sendiri pertama kali diumumkan pada saat kunjungan Xi Jinping ke Kazakhstan dan Indonesia di 2013 dengan visi membangun jaringan luas jalur kereta api, jalur pipa energi, jalan raya, dan lintas batas langsung dari barat ke timur dan sebaliknya. Selain itu melalui BRI, Cina juga berencana berinvestasi pada pembangunan pelabuhan di sepanjang garis Samudera Hindia untuk mengakomodir lalu lintas perdagangan maritim di masa yang akan datang. Hingga saat ini BRI tercatat telah berhasil mengajak 147 negara atau dua per tiga negara di dunia untuk menyetujui bekerja sama dalam proyek tersebut.

BRI merupakan salah satu langkah Cina untuk membangun strategi hubungan perdagangan baru, memperkuat ekspor, dan mempercepat pendapatan negaranya. Dengan begitu Cina diharapkan mampu keluar dari *middle income trap* yang telah menjangkit hampir 90 persen negara kelas menengah sejak tahun 1960-an. Serta terakhir BRI juga menjadi langkah Cina untuk mendapatkan keuntungan geopolitik dengan menjebak negara-negara yang terlibat dalam BRI untuk gagal dalam membayar hutang proyek mereka (McBride et al., 2023).

Dalam upaya melawan BRI yang digagas Cina, AS melalui pemerintahan Joe Biden berkolaborasi bersama negara-negara G7 meluncurkan *Build Back Better World Initiative* (B3W) yang merupakan sebuah program investasi infrastruktur. Namun meskipun begitu, kurangnya pendanaan dalam B3W menjadi penghalang besar bagi proyek tersebut untuk menjadi lawan sepadan BRI yang dimiliki Cina, yang membuatnya hanya berselang setahun setelah diluncurkan, B3W diubah menjadi *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) yang bertujuan untuk memobilisasi ratusan triliun dolar pembiayaan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah hingga menengah (The White House, 2023b).

Selanjutnya setelah melakukan pengembangan besar-besaran dalam sektor investasi dan ekonomi, Cina dengan jumlah uang yang sangat besar memberikan perhatian khusus pada sektor militernya untuk semakin mempertahankan hegemoni negaranya yang bukan hanya bergantung pada *soft power* tetapi juga *hard power*. Oleh karena itu dalam sub bab pembahasan berikutnya penulis akan memberikan sejumlah gambaran mengenai perkembangan sektor militer yang telah dilakukan Cina dalam beberapa tahun terakhir.

Modernisasi Militer Cina

Seiring dengan kemajuan ekonominya, Cina tak lupa pula memperhatikan langkah strategi baru dalam menyusun dan mengembangkan kekuatan militer yang mereka miliki. Cina dengan jumlah personil militer dan persenjataan yang mumpuni nyatanya berangsur-angsur mengalihkan fokus mereka kepada sektor teknologi mutakhir sebagai langkah dalam memenangkan pertempuran di masa yang akan datang. Cara yang dilakukan Cina adalah dengan melakukan *Revolution in Military Affairs* (RMA) atau Revolusi dalam Urusan Militer dimana cara tersebut mengacu pada perubahan mendasar dalam cara perang dilakukan dan kekuatan militer dioperasikan. RMA berfokus pada penerapan inovasi teknologi dalam ranah militer untuk mencapai keunggulan taktis dan strategis.

Perlu dicatat bahwa Cina telah menyatakan bahwa kekuatan militernya bersifat defensif. Namun, pernyataan tersebut tidak menghilangkan kekhawatiran akan pesatnya modernisasi dari militer Cina dapat digunakan untuk tujuan *offensive* pula. Jika dilihat dari kecepatan program modernisasi militernya dalam konsep RMA, apa yang dilakukan Cina menunjukkan kemungkinan adanya tujuan *offensive* yang akan berubah di saat suatu operasi militer diluncurkan, mengingat Cina mendirikan suatu bernama "*system of system*" dan mengembangkan segala dimensi militernya mencakupi udara, darat, maritim, siber dan antariksa. Selain itu Cina juga mempersiapkan dirinya terhadap kemungkinan perang berbasis jaringan dimana informasi berguna harus di keluarkan melalui rentetan data dan diproses dengan cara paling efisien.

Strategi penggunaan peralatan berteknologi tinggi untuk kemungkinan perang di masa depan mengalami pergeseran paradigma di tahun 2022, dimana saat itu arahnya mulai berubah kepada informatisasi. Baru baru ini pemerintah Cina mengumumkan rencanya untuk menguatkan gabungan pengembangan mekanisasi dan informatisasi dengan perkembangan terakhir sebagai faktor utama. Di saat yang bersamaan, modernisasi militer Cina juga berkonsentrasi pada teknologi baru paling ampuh seperti di bidang supersonik, peralatan siluman, perangkat anti satelit, dan konsep persenjataan baru seperti teknologi *high-power microwave*. Mengenai modernisasi persenjataan nuklir, Cina bermaksud untuk memastikan bahwa kemampuan serangan kedua siap jika aksi pembalasan diperlukan. Dipercaya bahwa sebagian besar rudal Cina akan bergerak di jalan raya dan berbahan bakar padat, seperti rudal jarak jauh DF-31A yang bahkan jarak jangkauannya dapat mencapai seluruh wilayah AS. Di masa kini, Cina dipercaya memiliki 110-140 misil strategis bersenjata nuklir yang 55-56 diantaranya adalah rudal balistik antar benua.

Selain melalui strategi misil sentriknya, Cina secara besar-besaran memodernisasi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat-nya (*PLA Navy*). *PLA Navy* dipersenjatai dengan 5 kapal selam bertenaga nuklir, 48 kapal selam konvensional, 86 pesawat patrol pesisir dan 51 kapal amfibi berbagai tipe. Kapal selam berbahan bakar nuklir jenis *Shang-class* dan kapal selam berbahan bakar nuklir jenis *Jin-class* ditambahkan menjadi kekuatan baru Cina pada 2007, dan kapal selam *Shang-class* diharapkan dapat menjadi pondasi dari "*Blue Water*" Cina. *Blue Water* sendiri merupakan sebutan yang berarti angkatan laut memiliki kapasitas untuk menerjunkan gugus tugas kapal di laut terbuka dan membantu mereka dari jarak jauh (Farley, 2021).

STUDI KASUS PERSAINGAN AS-CINA DI LAUT CINA SELATAN

Isu klaim kedaulatan Cina di LCS dan hubungannya dengan kemajuan ekonomi dan bidang militer Cina selama beberapa dekade belakangan mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks dan penting di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian internasional terhadap masalah ini semakin meningkat, karena LCS merupakan jalur perdagangan yang vital, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki implikasi strategis bagi kekuatan regional dan global. Latar belakang sejarah klaim kedaulatan Cina di LCS dapat ditelusuri hingga ke era sebelum Perang Dunia II. Pada tahun 1947, Pemerintah Republik Cina mengeluarkan peta semu yang dikenal sebagai *Nine Dash Line* (Sembilan Garis Putus) yang menunjukkan klaim teritorial yang luas di LCS. Peta ini menjadi dasar hukum yang diklaim oleh pemerintah Republik Cina dan kemudian diwarisi oleh Republik Rakyat Cina. Tetapi tentu saja klaim secara sepihak tersebut mendapat pertentangan keras dari negara-negara tetangga di sekitarnya yang secara sah memiliki klaim teritorial yang diakui oleh dunia internasional untuk memanfaatkan wilayah lautnya. Beberapa negara yang bertentangan dengan Cina dalam hal ini terutama Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Kedudukan negara-negara ASEAN yang bergantung dengan Cina atas aktifitas ekonominya dalam investasi, perdagangan, dan infrastruktur membuat negara-negara tersebut dihadapi dengan situasi yang kompleks. Misalnya di satu sisi negara seperti Filipina ingin mempertahankan kedaulatan maritimnya demi menjaga salah satu sumber pendapatannya yakni hasil laut untuk kepentingan ekonominya, namun di sisi lain Cina merupakan lawan yang tidak sepadan bagi angkatan laut Filipina dengan segala keterbatasan kapal Angkatan Laut yang dimiliki.

AS sebagai negara *super power* melihat dinamika isu ini sebagai tantangan bagi pengaruh dan kekuasaannya terhadap posisinya dalam percaturan geo-politik global. LCS merupakan kawasan yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sebagai jalur laut utama yang menghubungkan pengiriman barang antar benua. Klaim Cina atas LCS secara sepihak bukan hanya membahayakan dan merugikan kepentingan nasional AS terlepas posisinya yang berada di belahan dunia lain, namun juga memiliki implikasi besar bagi kestabilan ekonomi dunia dimana satu per tiga perdagangan dunia melewati LCS sebagai jalur transportasi. Hal tersebut tentu tidak membuat AS tinggal diam dalam upayanya menjaga kestabilan dan keamanan dunia seperti yang digaungkannya selama ini.

Melalui laporan *National Security Strategy 2022*, AS menyadari bahwa Cina adalah satu-satunya kompetitor yang memiliki niatan untuk mengubah tatanan dunia, dan memiliki kemampuan dalam hal ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun AS memiliki 3 strategi untuk melawan hal tersebut. Yang pertama adalah untuk berinvestasi dalam ketahanan domestik melalui daya saing, inovasi, ketahanan, dan demokrasi. Yang kedua adalah dengan meluruskan upaya AS dengan jaringan negara *partner* dan sekutu untuk berperilaku dengan sebab dan tujuan yang sama. Dan yang ketiga adalah bersaing dengan Cina untuk mempertahankan kepentingan AS dan membangun visi untuk masa depan. Lebih lanjut melalui *National Security Strategy 2022* tersebut AS menyatakan 10 tahun kedepan merupakan dekade yang akan sangat menentukan, karena posisi dan pilihan yang dibuat AS saat ini merupakan jalur yang akan menentukan posisi daya saingnya jauh di masa depan (The White House, 2022).

Sebetulnya dalam melihat isu ini sejak jauh-jauh hari sebelum adanya AUKUS, AS telah memiliki suatu strategi dalam menangkal dan mengepung pergerakan Cina untuk menguasai Taiwan dan LCS yang bernama *Island Chain Strategy*. Strategi ini diprakarsai oleh John Fuster Dulles, seorang visioner kebijakan luar negeri pada era Perang Dingin dengan tujuan menekan pergerakan Uni Soviet dan Cina kala itu melalui jaringan pangkalan angkatan laut di wilayah Pasifik Barat (Jodhi, 2022). Lebih lanjut setelah berakhirnya Perang Dingin, *Island Chain Strategy* ternyata masih cukup relevan dalam menjadi taktik strategi bagi AS dalam mencoba melawan pergerakan Cina di LCS yang dalam dekade belakangan mampu menjadi ancaman baru bagi hegemoni AS di Indo-Pasifik.

Kehadiran Militer Cina di Laut Cina Selatan

Data mencerminkan kehadiran militer Cina yang semakin kuat di LCS. Berdasarkan pemantauan satelit dan laporan dari negara-negara tetangga, Cina telah membangun dan memperluas pulau-pulau buatan di wilayah tersebut. Beberapa pulau ini telah diubah menjadi pangkalan militer dengan landasan pacu, pangkalan rudal, dan infrastruktur pertahanan lainnya. Selain itu, Cina juga telah meningkatkan kehadiran kapal-kapal patroli dan pengawasan di LCS, yang memperkuat klaim kedaulatannya (Peck, 2022). Data lainnya juga menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi Cina di LCS. Cina telah mengambil langkah-langkah untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk pengeboran minyak dan gas serta penangkapan ikan. Selain itu, Cina telah melancarkan proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan dan fasilitas perdagangan, yang meningkatkan konektivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Berbagai aktifitas yang dilakukan Cina di LCS kebanyakan melanggar hukum internasional yang berlaku. Salah satu perjanjian yang menjadi acuan utama dalam hal ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani pada tahun 1982. UNCLOS mengatur prinsip-prinsip hukum laut yang meliputi batas-batas wilayah maritim, hak-hak negara di perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Namun, klaim kedaulatan Cina di LCS, terutama dalam hal klaim teritorial yang luas dan mencakup sebagian besar wilayah tersebut, telah menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar ketentuan UNCLOS. Selain pelanggaran terhadap prinsip-prinsip UNCLOS, tindakan Cina juga termasuk dalam kegiatan yang merugikan lingkungan dan ekosistem di LCS. Pembangunan pulau-pulau buatan dan infrastruktur militer di wilayah tersebut telah mengubah ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam di kawasan tersebut (Basu & Chaturvedi, 2021).

AUKUS Sebagai Respon AS terhadap Cina

Isu terkait keamanan dan militer, terutama yang berkaitan dengan Taiwan dan Laut Cina Selatan (LCS), dimana Taiwan sendiri tidak pernah diakui oleh Cina sebagai negara berdaulat, menyebabkan Cina secara bebas dan terang-terangan kerap melakukan berbagai latihan militer besar-besaran di wilayah sekitar Taiwan. Di sisi lain AS yang menganut *One China Policy* atau Kebijakan Satu Cina (hanya mengakui Cina daratan sebagai negara yang sah) turut pula memiliki relasi dengan Taiwan yang

tertuang dalam *Taiwan Relation Act* yang memungkinkan AS menyediakan bantuan pertahanan militer bagi Taiwan untuk mengamankan jaminan kedamaian masa depannya, Cina melihat hal tersebut sebagai provokasi dan pelanggaran dari *One China Policy* sehingga membuat hubungan antar kedua negara memanas (Kube et al., 2023).

Selain isu dengan Taiwan terdapat pula isu yang tak kalah penting yakni terkait dengan isu di LCS, dimana Cina sebagai negara *emerging power* yang berusaha menyaingi Amerika Serikat kerap kali melakukan tindakan provokatif dalam mempertahankan klaim wilayahnya. Klaim Cina menggunakan garis imajiner terhadap LCS menciptakan ketegangan dengan negara-negara di sekitarnya termasuk negara aliansi AS seperti Filipina. Dalam menyikapi isu tersebut AS melaksanakan *Freedom of Navigation Operation* di LCS dengan kapal perangnya guna melawan klaim sepihak Cina mengenai kawasan perairan tersebut dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Cina tidak konsisten dengan hukum internasional yang berlaku (Mongilio, 2023). Alasan dibentuknya AUKUS sendiri adalah karena adanya latar belakang lingkungan keamanan yang memburuk khususnya seputar pertumbuhan eksponensial kekuatan militer Cina dan kebijakan luar negerinya yang asertif selama dekade terakhir (Edel, 2023).

Dalam melawan kekuatan Cina di LCS, AS telah melakukan beberapa strategi seperti melakukan latihan gabungan militer, berpatroli di LCS, dan mengaktifkan kembali pangkalan militernya sebagai cara memperkuat kehadiran AS di kawasan tersebut. Namun nampaknya hal tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal karena Cina didukung oleh kekuatan militernya yang masif dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan agresif kepada negara-negara di seputaran kawasan yang berujung kepada ketegangan dan terganggunya kestabilan kawasan LCS. Kekuatan Cina di benua Asia menjadi salah satu yang terbesar, dan klaimnya akan LCS yang berhadapan langsung dengan banyak negara di Asia Tenggara membuat Cina tidak memiliki tandingan militer yang sepadan dari kalangan negara-negara Asia Tenggara.

Selain dari sisi militer, banyak negara di Asia Tenggara juga bergantung kepada Cina dari sisi ekonomi yang membuat semakin sulitnya posisi negara-negara ASEAN dalam konflik di LCS. AS sebagai negara adidaya melihat klaim kedaulatan Cina atas LCS sebagai pelanggaran atas kebebasan berlayar (*Freedom of Navigation*). Selain melanggar hukum internasional seperti UNCLOS, klaim sepihak Cina berpotensi mengganggu jalur perdagangan dan kepentingan AS lainnya yang akan berdampak buruk pada ekonomi AS sehingga dibutuhkan suatu upaya baru dalam melawan posisi Cina di LCS. Akibat hal tersebut AS dengan Angkatan Lautnya rutin mengadakan *Freedom of Navigation Operation* (FONOP) di wilayah LCS sebagai bagian dari usaha mendemonstrasikan bahwa AS akan terbang, berlayar, dan beropasi dimana saja yang dipebolehkan oleh hukum internasional.

Dalam laporan terakhir Departemen Pertahanan AS terkait FONOP tahun 2022 dijelaskan bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2022, pasukan AS secara operasional telah menentang 22 klaim maritim berlebihan (*excessive maritime claim*) berbeda yang dibuat oleh 15 penggugat berbeda di seluruh dunia. Lebih lanjut juga dijelaskan selama pembatasan navigasi dan penerbangan masih ada dan melanggar hukum internasional yang telah ditetapkan, AS akan senantiasa melawan tindakan tidak berdasar hukum tersebut dan menjunjung tinggi hak, kebebasan, hukum-hukum laut bagi manfaat seluruh negara-negara di dunia. Sebagai upaya tambahan baru dari strategi yang sudah ada sebelumnya termasuk *Freedom of*

Navigation Operation (FONOP) yang telah penulis bahas, AS bersama dengan Inggris dan Australia meresmikan sebuah pakta pertahanan trilateral yang disingkat dengan nama AUKUS pada 2021 lalu.

Dalam perjanjian tersebut terdapat dua pilar utama yang menjadi bagian penting bagi AUKUS. Pilar Pertama perjanjian ini adalah pengiriman kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia, mengenai proses kemajuan dari Pilar Pertama itu sendiri, pada 13 Maret 2023, setelah adanya pertemuan antara tiga kepala negara anggota, AS melalui situs *White House* resmi mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka menggunakan pendekatan ambisius dalam memastikan Australia mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir dengan senjata konvensional dalam waktu sedekat mungkin sembari memastikan kapasitas Australia dalam mengoperasikan, menjaga, dan mengatur teknologi yang baru diserahkan tersebut, dan tak lupa juga menjujung tinggi standar non-proliferasi nuklir (The White House, 2023a). Lebih lanjut pendekatan bertahap yang dilakukan negara-negara anggota AUKUS hingga saat pernyataan tersebut dikeluarkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Pilar Pertama Implementasi AUKUS

<p><i>Embedded Personnel and Port Visits</i> (Penerjunan Personil dan Kunjungan ke Galangan Kapal)</p>	<p>Mulai pada tahun 2023, personel militer dan sipil Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Laut Kerajaan Inggris di pangkalan industri kapal selam Amerika Serikat dan Inggris untuk melakukan latihan dan pengembangan bagi Australia.</p>
<p>Rotasi Penempatan Kekuatan Kapal Selam (<i>Submarine Rotational Forces</i>)</p>	<p>Pada awal tahun 2027, Inggris dan Amerika Serikat berencana untuk menempatkan satu kapal selam kelas Astute Inggris dan empat kapal selam kelas Virginia AS di HMAS Stirling dekat Perth, Australia Barat.</p>
<p>Penjualan Kapal Selam AS kepada Australia (<i>Sale of U.S. Virginia Class Submarines</i>)</p>	<p>Dimulai pada awal tahun 2030-an, sambil menunggu persetujuan dari Kongres AS, Amerika Serikat bermaksud untuk menjual tiga kapal selam kelas Virginia kepada Australia, dengan potensi untuk menjual hingga dua lagi jika diperlukan.</p>
<p>SSN-AUKUS</p>	<p>Australia dan Inggris bermaksud untuk mulai membangun SSN-AUKUS di galangan kapal dalam negerinya sebelum akhir dekade ini.</p>

Sumber: (Edel, 2023)

Sedangkan Pilar Kedua difokuskan pada jaringan kerjasama yang luas untuk menguatkan kemampuan bersama dan interoperabilitas antar ketiga negara

(Christianson et al., 2023). Penjelasan lebih lanjut mengenai Pilar Kedua AUKUS mengenai rencana yang akan dilakukan di masa mendatang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Pilar Kedua Implementasi AUKUS

Kemampuan Bawah Air (<i>Undersea Capabilities</i>)	Mengembangkan kendaraan bawah air otonom melalui proyek AUKUS <i>Undersea Robotics Autonomous Systems</i> (AURAS), yang diharapkan masuk tahap uji coba dan eksperimen pada awal tahun 2023.
Teknologi Kuantum (<i>Quantum technologies</i>)	Bersama negara mitra, AUKUS ingin menghadirkan “kemampuan kuantum generasi demi generasi” melalui AUKUS <i>Quantum Arrangement</i> (AQuA). Fokus awalnya adalah pada teknologi penentuan posisi, navigasi, dan pengaturan waktu, yang akan diintegrasikan dalam uji coba dan eksperimen selama tiga tahun ke depan.
Kecerdasan Buatan & Otonomi (<i>AI & Autonomi</i>)	Menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan dan mempertahankan diri dari ancaman yang didukung oleh <i>AI</i> . Dalam bidang ini, fokus awalnya adalah pada adopsi dan ketahanan sistem otonom dan sistem yang mendukung <i>AI</i> di lingkungan yang penuh persaingan.
Kemampuan Siber Tingkat Lanjut (<i>Advanced cyber capabilities</i>)	Berfokus pada melindungi komunikasi dan sistem operasi penting.
Kemampuan Hipersonik (<i>Hypersonic and counter-hypersonic capabilities</i>)	Negara mitra fokus dalam mempercepat pembangunan.
<i>Electronic Warfare</i>	Fokus utama pada peningkatan interoperabilitas melalui pemahaman bersama tentang alat, teknik, dan teknologi untuk operasi di lingkungan yang diperebutkan dan terdegradasi.
Inovasi (<i>Innovation</i>)	Mempercepat inovasi pertahanan, saling belajar, dan mengintegrasikan teknologi komersial.
Pertukaran Informasi (<i>Information Sharing</i>)	Untuk memungkinkan alur kerja Pilar Dua lainnya dengan memperluas dan

	mempercepat pembagian informasi sensitif.
--	-------------------------------------------

Sumber: (Edel, 2023)

Perjanjian AUKUS menjadi bukti seriusnya pemerintahan AS dibawah Joe Biden dalam mengalihkan fokusnya dari kawasan Timur Tengah ke Asia Pasifik sebagai langkah AS dalam mempertahankan hegemoninya dari gempuran Cina sebagai negara *emerging power* (Cheng, 2022). AS dalam hal ini menggandeng Inggris dan Australia bukan tanpa alasan, selain telah menjadi sekutu dalam berbagai perang sejak Perang Dunia II, Inggris dan Australia memiliki kepentingan yang saling menguntungkan dalam kerjasama ini. Australia sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan Perancis dalam pembuatan kapal selam bertenaga nuklir, namun terlalu lambatnya Perancis dalam menyelesaikan perjanjian tersebut membuat Australia menarik diri karena menilai kondisi strategis Australia yang berbahaya saat ini membutuhkan respon kerja sama yang lebih cepat. Bersamaan dengan hal itu, AS juga memiliki kepentingan untuk melindungi Australia sebagai sekutunya dari ancaman Cina yang membuat Australia menjadi mitra yang sesuai untuk AUKUS.

Walaupun hubungan antara AS dan Australia sangat dekat, hal tersebut tidak lantas membuat publik di Australia selalu setuju dengan apa yang dilakukan pemerintahnya. Seperti diketahui, Australia telah menjalin hubungan yang kuat dengan AS dimana Australia selalu ikut dalam setiap perang yang dilakukan AS, terlebih lagi Australia mengambil posisi terdepan dalam kampanye anti Cina demi menjaga hegemoni AS. Namun upaya tersebut mengakibatkan rusaknya hubungan antara Australia dengan Cina dalam sektor ekonomi dan perdagangan yang diperparah dengan dukungan dari pemerintahan Joe Biden yang dianggap hanya bualan belaka dalam konteks membantu ekonomi Australia.

Di sisi lain terdapat pula keuntungan yang diperoleh Australia dalam AUKUS. Perjanjian AUKUS dapat memberi peningkatan dalam status dan pengaruh Australia di kawasan, walaupun dikenal sebagai kekuatan kelas menengah, dengan adanya AUKUS Australia dapat menempatkan dirinya sejajar dengan negara-negara kuat aliansi AS yang kekuatannya jauh diatas Australia dan diharapkan mampu mengatasi ketidakpercayaan diri Australia di masa mendatang. Terlebih lagi dengan adanya AUKUS, Australia mendapatkan teknologi militer paling mutakhir seperti misil hipersonik dan pesawat tanpa awak. Yang terakhir pembangunan kapal selam dalam perjanjian AUKUS akan melibatkan puluhan ribu tenaga kerja dari Australia yang akan sangat membantu peningkatan produktivitas ekonomi di negara tersebut.

Pengesahaan AUKUS menjadi tanda besar pergeseran dalam strategi global AS. Pergeseran tersebut terjadi atas dua dasar kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh pemerintah AS. Yang pertama adalah kebangkitan Cina tidak mungkin dapat dihentikan, dan yang kedua adalah AS telah kehilangan kepercayaan dirinya dalam membendung kekuatan Cina, terlebih lagi kerjasama strategi koordinasi komperhensif antara Cina dan Rusia sebagai dua kekuatan Eurasia sulit untuk diredam AS. Di sisi lain hubungan antara AS dengan negara-negara Eropa telah melebar yang ditandai dengan Brexit sebagai akhir dari era laut kekuatan yang mengendalikan urusan Eropa kontinental sejak Revolusi Industri, dan Eropa dipimpin oleh daratan kekuatan Jerman dan Prancis terikat

untuk menolak perintah AS dan semakin mengejar “kemerdekaan” untuk kepentingannya sendiri.

AUKUS adalah landasan strategi baru AS “*retreat as advance*” yang berarti mundur demi sebuah kemajuan. Tujuan utamanya adalah untuk menguasai lautan dan lalu mempertahankan dominasi strategis di dalam urusan internasional, khususnya dalam kompetisi dengan Cina. Dalam hal menguasai lautan, kekuatan ketiga negara anggota AUKUS disusun dengan hampir sempurna. Sebagai satu-satunya pulau di dunia yang menghadap Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, kekuatan superior maritim AS membuat kemungkinan serangan langsung terhadap wilayahnya sangat sulit dan juga memberikan keuntungan pergerakan bebas bagi angkatan laut AS dalam berlayar mengarungi samudera Pasifik dan Atlantik, Walaupun Inggris bukan sedang dalam masa terbaiknya pasca Brexit, kekuatannya tetap menjadi yang terbesar di Eropa. Dengan dibantu oleh AS, AUKUS memperbolehkan Inggris untuk mempertahankan dan mengamankan Atlantik bersama AS saat mundur maupun saat menyiapkan serangan dan membantu AS untuk merebut Pasifik saat maju.

Saat Australia resmi mendapatkan kapal selam nuklirnya nantinya, kelemahan Australia menjadi sangat jauh menurun dan akan langsung meningkat ke kekuatan strategis yang sangat diperlukan. Terlebih Laut Pasifik Selatan dan Samudera Hindia yang luas bukan hanya menjadi pembatas keamanan alami Australia, tetapi juga dapat bertindak sebagai tempat persembunyian dan manuver bebas yang ideal untuk kapal selam nuklirnya. Jika dibutuhkan, kapal selam tersebut juga bisa digunakan untuk menyerang musuh secara tiba-tiba.

Kemudian beranjak terhadap kaitan pembahasan yang telah dijabarkan di atas terkait dengan konsep *deterrence*, AS menggunakan AUKUS sebagai ancaman untuk meyakinkan Cina agar lebih menahan diri dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan ketegangan di kawasan LCS. AUKUS yang bersifat defensif dan fokus terhadap perkembangan teknologi dapat dijadikan perlindungan bagi Australia dan tak terkecuali seluruh negara aliansi AS di Asia-Pasifik dari ancaman agresifitas militer Cina yang kerap melakukan tindakan keras kepada negara yang kekuatannya dirasa lebih lemah. Lebih lanjut dilihat melalui *extended deterrence*, AS menggunakan partisipasi aliansinya yakni Australia dalam AUKUS karena dianggap sebagai partner yang paling rentan sekaligus strategis dalam menjamin posisinya untuk menanggapi dan ikut terlibat dalam upaya AS menyeimbangkan kekuatan Cina di LCS, yang diperkuat dengan latar belakang belum adanya upaya militer yang kuat antara pemerintah AS dan Australia dalam membentuk suatu strategi pertahanan seperti apa yang dilakukan AS dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

Terakhir, jika berkaca pada arti *extended deterrence* itu sendiri yakni sebuah komitmen untuk mencegah dan merespon segala spektrum dari ancaman nuklir dan non-nuklir dalam mempertahankan aliansi dan sekutu, maka Australia memang merupakan negara yang sangat tepat untuk dijadikan partner oleh AS dalam upaya-nya menyeimbangkan kekuatan Cina di LCS. Kekuatan Cina yang salah satunya diakibatkan oleh kepemilikan senjata nuklir dapat setidaknya di lawan oleh AS dengan menarik Australia sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk diajak bekerja sama tanpa melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir yang telah disepakati. AUKUS menjadi salah satu cara cerdas AS dalam menjamin keamanan sekutunya (Australia) tanpa harus melanggar perjanjian non-proliferasi yang dapat menimbulkan perpecahan

di kalangan komunitas internasional. Terlebih lagi AUKUS yang dapat berperan menjadi *nuclear umbrella* (jaminan keamanan dari negara pemilik nuklir) untuk Australia yang merupakan langkah ideal bagi pemerintah Australia dalam merespon kekhawatiran publik dalam melihat pergerakan Cina dalam beberapa dekade terakhir.

KESIMPULAN

Kemunduran AS dalam sektor militer dan ekonomi telah membuatnya perlahan-lahan kehilangan hegemoni dan martabatnya di hadapan negara-negara di dunia termasuk dalam hal ini Cina. AS yang dikenal sebagai negara adikuasa dengan proyeksi kekuatan militer yang sangat besar di dunia termasuk di kawasan Asia Pasifik, mulai dihadapkan dengan tantangan baru dari kebangkitan Cina yang memanfaatkan kelebihan sumber daya alam dan sumber daya manusia-nya sehingga sukses membangun ekonomi yang di kemudian hari membantu menunjang sektor militernya. Akibat dari hal tersebut, Cina menjadi overpower dan secara sepihak melakukan klaim kedaulatan di LCS dan tidak membuka ruang diskusi dengan negara-negara tetangga yang menyebabkan terjadinya ketegangan setiap kali Cina melakukan patroli terhadap kapal-kapal milik negara lain. Tidak adanya kekuatan lokal di Asia Pasifik yang dapat membendung Cina menyebabkan AS sebagai negara superpower yang juga memiliki banyak kepentingan di LCS memutuskan untuk membentuk aliansi baru guna mengatasi hal tersebut.

AUKUS dibentuk AS sebagai respon atas kekuatan Cina di LCS untuk mempertahankan hegemoninya, melindungi sekutunya dan menambah kekuatan militernya yang selama ini dianggap oleh berbagai pihak mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Poin-poin dalam perjanjian AUKUS juga dilandaskan atas keinginan AS untuk mengembangkan dan memajukan teknologi-nya untuk menyaingi RMA yang dilakukan oleh Cina. Inggris dan Australia dipilih sebagai partner AS dalam kerjasama ini dilandaskan atas *mutual trust* dan kepentingan yang sama dari ketiga negara anggota. Keterlibatan Inggris dan Australia dalam AUKUS diharapkan akan memberi dukungan tambahan AS untuk menekan pengaruh Cina di LCS melalui langkah program strategi jangka pendek dan jangka panjang yang tertuang dalam pilar pertama dan pilar kedua perjanjian AUKUS. Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada faktor pembentukan AUKUS, tujuan yang ingin dicapai, dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut, serta rentang waktu yang singkat, dari mulai pembentukan AUKUS tahun 2021 hingga dengan tahun 2023, sehingga penelitian selanjutnya pada topik ini perlu mengkaji berdasarkan faktor lain, penggunaan teori yang lebih menggambarkan situasi di lapangan dan mencari sumber primer.

REFERENSI

- Anadolu. (2023, March 14). *Australia beli tiga kapal selam di bawah kemitraan AUKUS* (M. R. Rahman (ed.); Y. H. Djohan (trans.)). Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3440310/australia-beli-tiga-kapal-selam-di-bawah-kemitraan-aucus>
- Aulia, J. D., & Sahide, A. (2022). Regional Stability Rivalry in the Indo Pacific Region: China's Interests in Responding the AUKUS Trilateral Pact. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(9), 412–423.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i9.4149>
- Basu, P., & Chaturvedi, A. (2021). *In Deep Water: Current Threats to the Marine Ecology of the South China Sea*. <https://www.orfonline.org/research/in-deep-water-current-threats-to-the-marine-ecology-of-the-south-china-sea/>
- Bateman, J. (2022). *Maintaining a Military Edge Over China*. Carnegie Endowment for International Peace.
- BBC Indonesia. (2019, May 26). *Huawei: Lima alasan mengapa Barat begitu khawatir dengan perusahaan teknologi China*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48336363>
- Cheng, M. (2022). AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>
- Christianson, J., Monaghanand, S., & Cooke, D. (2023, July 10). *AUKUS Pillar Two: Advancing the Capabilities of the United States, United Kingdom, and Australia*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/aukus-pillar-two-advancing-capabilities-united-states-united-kingdom-and-australia>
- Danesworo, S., & Munabari, F. (2018). Dampak Arms Military Build-Up Tiongkok Terhadap Stabilitas Keamanan Negara- Negara Aliansi Amerika Serikat Di Kawasan Asia Pasifik Periode 2012-2017. *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 2(2), 137–147.
- Durante, A. (2022, May 13). *U.S.-China Trade War Hurt American Industries and Workers*. Tax Foundation. <https://taxfoundation.org/blog/us-china-tariffs-trade-war/>
- Edel, C. (2023, March 16). *The United States, Britain, and Australia Announce the Path Forward for AUKUS*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/united-states-britain-and-australia-announce-path-forward-aukus>
- Farley, R. (2021, November 10). *Does China Qualify as Having a True Blue Water Navy?* National Interest. <https://nationalinterest.org/blog/reboot/does-china-qualify-having-true-blue-water-navy-195958>
- Frankel, J., & Waltz, K. N. (1980). Theory of International Politics. *International Journal*, 35(3), 600. <https://doi.org/10.2307/40201892>
- Hasan, M. I. (2002). *2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- He, L., McCarthy, S., & Chang, W. (2023, March 7). *China to Increase Defense Spending 7.2%, Sets Economic Growth Target of "around 5%" for 2023*. CNN. <https://edition.cnn.com/2023/03/04/economy/china-two-sessions-gdp-growth-target-military-spending-intl-hnk/index.html>
- Huth, P. K. (1999). Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates. *Annual Review of Political Science*, 2, 25–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.25>
- Jodhi, J. S. (2022, June 18). *Island chain strategy: Steps to checkmate China*. Financial Express. <https://www.financialexpress.com/business/defence-island-chain-strategy-steps-to-checkmate-china-2565232/>
- Kennedy, P. S. J. (2022). Analysis of the Indo-Pacific Outlook and Impact of the AUKUS Triateral Pact. *Sarcouncil Journal of Economics and Business Management*, 1(8), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7342624>
- Kube, C., Lebowitz, M., & Jett, J. (2023, April 8). *Taiwan: Explaining the U.S.-China dispute and why it matters*. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/taiwan-us-china-dispute-why-it-matters->

flashpoint-democracy-rcna78458

- Lee, T. (2023, January 11). *Section 301 China Tariffs by End Use*. The American Action Forum. <https://www.americanactionforum.org/research/section-301-china-tariffs-by-end-use/>
- Liao, K. (2020). The future war studies community and the Chinese revolution in military affairs. *International Affairs*, 95(05), 1327. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ia/iiaa098>
- McBride, J., Berman, N., & Chatzky, A. (2023, February 2). *China's Massive Belt and Road Initiative*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounders/chinas-massive-belt-and-road-initiative>
- Meilianawati, S. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Extended Deterrence Amerika Serikat Terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4). [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/17.1102045159 - Selly Meilianawati \(11-01-17-01-57-11\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/17.1102045159-Selly%20Meilianawati%20(11-01-17-01-57-11).pdf)
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Mongilio, H. (2023, March 24). *China Protests U.S. South China Sea Freedom of Navigation Operation*. U.S. Naval Institute. <https://news.usni.org/2023/03/24/china-protests-u-s-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation>
- Novita, A. A. D. (2022). AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.883>
- Nurmamurti, R. A., Faradilla, A. Y., Rismanto, A. I., Afifah, S. N., Hamida, A., & Sari, K. H. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Trump: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat-China. *Jurnal Sosial Politik Intergratif*, 2(1), 62–70. <https://www.jisip.org/index.php/jsp/article/view/57/30>
- Peck, M. (2022, February 27). *Vivid new photos give you a rare look at the South China Sea islands that a top US commander says China has fully militarized*. Business Insider. <https://www.businessinsider.com/photos-show-details-of-chinese-south-china-sea-military-bases-2022-12>
- Puspaningrum, B. A. (2021, September 30). *AS “Kalah” dalam Perang 20 Tahun di Afghanistan, Jendral Tertinggi Ungkap Alasannya*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/30/103822070/as-kalah-dalam-perang-20-tahun-di-afghanistan-jendral-tertinggi-ungkap>
- Sobarini, E., Rajab, D. D. A., & Waluyo, S. D. (2021). AUKUS Pact in the Perspective of Security Dilemma. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(12), 3981–3985. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i12-74>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Textor, C. (2023, November 30). *Military expenditure in China from 1990 to 2022*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/267035/cina-military-spending/>
- The White House. (2022). *National Security Strategy*. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>
- The White House. (2023a, March 13). *Fact Sheet: Trilateral Australia-UK-US Partnership on Nuclear-Powered Submarines*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/fact-sheet-trilateral-australia-uk-us-partnership-on-nuclear-powered-submarines/>
- The White House. (2023b, May 20). *Fact Sheet: Partnership for Global Infrastructure*

and Investment at the G7 Summit. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/fact-sheet-partnership-for-global-infrastructure-and-investment-at-the-g7-summit/>

Waluyo, T. J., & Lestari, S. (2015). Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan Militer di Darwin Australia Tahun 2011. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(2).

Wene, A. L. (2021). Determinasi Pakta AUKUS Terhadap Keamanan Kawasan Asia Tenggara. *Determinasi Pakta AUKUS Terhadap Keamanan Asia Tenggara*, 5(2), 142–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.3990>